

Pengelolaan Warisan Budaya Di Era Desentralisasi: Studi Komparatif Indonesia Dengan Beberapa Negara

Muhammad Emir Al-Azkiya¹, Arni Fazira², Drajat Tri Kartono³

^{1,2}Magister Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Abstract

Decentralization grants more authority to local governments in Indonesia to manage their affair, including cultural matters. This research aims to understand cultural decentralization in Indonesia and several foreign countries such as Turkey, Serbia, Jordan, Ukraine, and the Czech Republic in terms of managing and developing cultural heritage. This study employs a qualitative research approach with a library research method. Ten (10) articles indexed in Sinta 1-4 and Scopus were selected for analysis in this research. The findings of this study indicate that cultural decentralization in Indonesia and foreign countries, particularly Ukraine, share similarities, and city branding by highlighting cultural heritage can positively impact economic progress through tourism and increase public awareness of preserving cultural heritage. Additionally, the role of local governments is crucial in determining the success of cultural decentralization in managing cultural heritage in Indonesia, Turkey, and Serbia. In contrast, the comparison of cultural decentralization in Jordan and the Czech Republic shows that centralization remains strong, even though local governments have the authority to manage their regions. Unlike Indonesia, decentralization is not merely a discourse.

Keywords: Cultural Decentralization, Cultural Heritage, Indonesia, Comparative Study

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang multikultural karena kaya akan budaya, bahasa, tradisi, dan, adat istiadatnya. Berdasarkan Statistik Kebudayaan yang dirilis pada tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, Indonesia memiliki 1.728 warisan budaya tak benda yang tersebar di masing-masing provinsi, dengan rincian yaitu seni pertunjukan berjumlah 503 warisan, disusun dengan adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan sebanyak 491 warisan, serta kemahiran dan kerajinan tradisional berjumlah sebanyak 440 warisan, tradisi dan ekspresi lisan sebanyak 219 warisan, serta pengetahuan

dan kebiasaan mengenai alam semesta sebanyak 75 warisan (Kemendikbudristek, 2023).

Selain warisan tak benda, Indonesia juga kaya akan peninggalan sejarah berupa cagar budayanya. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia telah menetapkan 196 cagar budaya yang terdiri dari 63 bangunan, 56 benda, 46 situs, 18 kawasan, dan 13 struktur (Direktorat Perlindungan Kebudayaan, 2022). Beberapa di antaranya bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia yaitu Candi Borobudur yang terletak

*) Corresponding Author

Email : muhammademir@student.uns.ac.id

di Magelang, Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta, Situs Manusia Purba Sangiran yang terletak di Sragen, Lanskap Budaya Subak yang terletak di Bali, dan Warisan Penambangan Batubara Ombilin yang terletak di Sawahlunto (Oktari, 2020).

Sebagai wujud dari pelaksanaan desentralisasi, tiap-tiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kekhasan yang ada di daerah tersebut (Fauzana, 2019). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa otonomi daerah telah membuka peluang bagi setiap wilayah untuk berinovasi dan membuat terobosan baru guna mengatasi tantangan yang mereka hadapi (Rosyadi et al., 2014). Dalam konteks ini, adanya desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah berkewenangan untuk menjaga dan melestarikan warisan-warisan budaya di daerahnya, baik itu warisan benda maupun warisan tak benda. Selain itu, pelestarian warisan budaya di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang ini lahir karena sampai pada saat itu belum ada peraturan perundang-undangan yang cukup memadai sebagai pedoman untuk Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia secara menyeluruh dan terpadu (Pemerintah Indonesia, 2017).

Lebih lanjut, desentralisasi dianggap sebagai sebuah angin segar bagi revitalisasi budaya, yaitu proses penghidupan kembali sebuah budaya atau tradisi yang dianggap telah hilang. Khususnya, bagi daerah-daerah di Indonesia yang memiliki warisan budaya,

kewenangan yang diberikan pemerintah dengan adanya sistem desentralisasi dapat membantu menghidupkan kembali budaya-budaya lokal, seperti mengadakan berbagai acara budaya yang meriah sebagai bentuk promosi dan *branding* suatu daerah dengan ciri khas dan keunikan tersendiri sesuai dengan identitas daerah tersebut (Pranoto, 2005).

Penelitian-penelitian yang mengangkat topik desentralisasi di sektor kebudayaan telah banyak dilakukan. Namun, masih belum ada penelitian yang membandingkan desentralisasi budaya di Indonesia dengan negara luar. Berdasarkan tinjauan literatur, studi tentang desentralisasi budaya telah menjadi topik penting yang sudah mulai dibahas sejak tahun 1988, yang pada saat itu berfokus pada desentralisasi dan kebijakan budaya (Konsola, 1988). Kajian tentang desentralisasi budaya juga gencar dibahas, mencakup desentralisasi dan warisan budaya (Hu, 2023; Sellato, 2015), desentralisasi yang melemahkan hak budaya (Buana, 2022), desentralisasi dan kebijakan budaya regional (Renko et al., 2022), serta desentralisasi dalam proses dekonsentrasi dan devolusi di sektor budaya (Santagati et al., 2020).

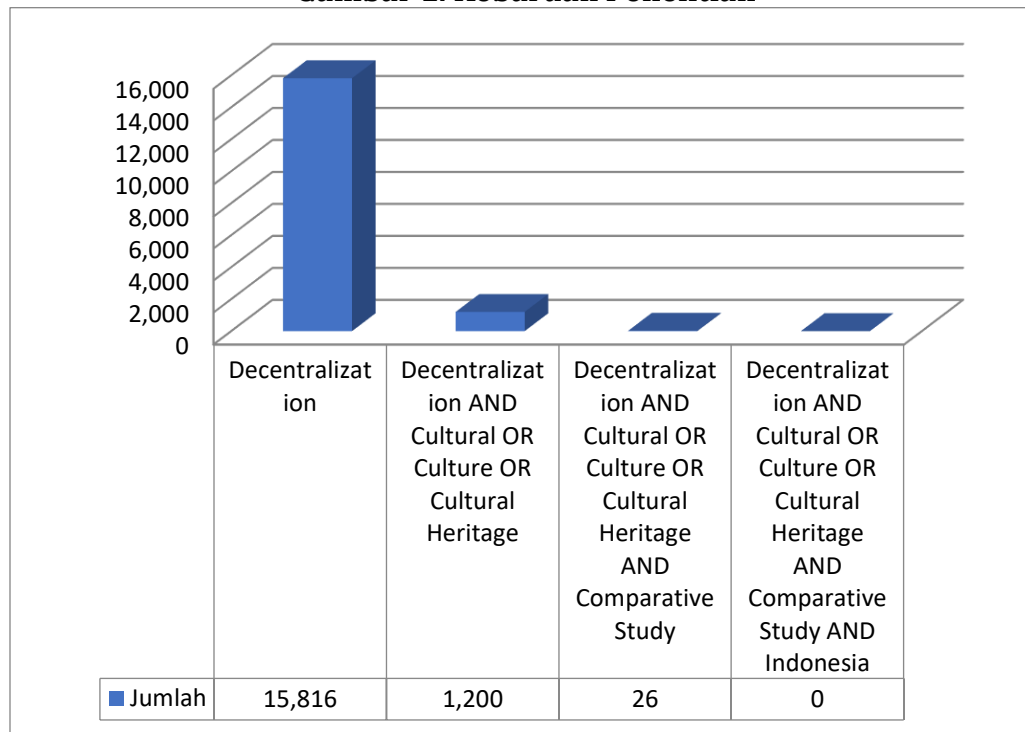
Bahkan, studi perbandingan lintas budaya dan implikasinya terhadap desentralisasi juga sudah pernah dibahas (Bonnell & Koontz, 2021). Secara keseluruhan, isu-isu mengenai desentralisasi budaya telah dikaji dan didiskusikan dari berbagai aspek multidimensional. Kajian tersebut melihat desentralisasi budaya dari berbagai sudut pandang, mulai dari kebijakan, pelestarian, hak, implementasi, hingga perbandingan antarwilayah atau negara. Namun, meskipun sudah banyak isu yang

dibahas dan studi perbandingan pernah dilakukan, belum ada yang secara spesifik membandingkan desentralisasi budaya di Indonesia dengan negara lain. Hal ini mengindikasikan adanya celah penelitian yang menarik.

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, penelusuran yang dilakukan di database Scopus pada 29 Juni 2024, dengan melakukan limitasi pada bidang subjek ilmu-ilmu sosial menggunakan kata kunci *"decentralization"* menghasilkan

sebanyak 15.816 dokumen. Kata kunci *"decentralization"* AND *"cultural"* OR *"culture"* OR *"cultural heritage"* menghasilkan 1.200 dokumen, kata kunci *"decentralization"* AND *"cultural"* OR *"culture"* OR *"cultural heritage"* AND *"comparative study"* hanya menghasilkan 26 dokumen, dan tidak ada publikasi ketika penulis memasukkan kata kunci *"decentralization"* AND *"cultural"* OR *"culture"* OR *"cultural heritage"* AND *"comparative study"* AND *"Indonesia"*.

Gambar 1. Kebaruan Penelitian



(Sumber: Diolah Penulis, 2024)

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk membahas perbandingan antara pengelolaan warisan budaya di Indonesia dengan di negara luar seperti Ukraina, Serbia, Republik Ceko, Yordania, dan Turki dalam konteks desentralisasi di sektor kebudayaan. Pemilihan negara-negara ini didasarkan pada banyaknya

warisan budaya yang ada di kelima negara tersebut, bahkan beberapa warisan budaya mereka juga telah diakui oleh UNESCO (Battaglia, 2024; Czech Walk, 2023; Quintero, 2023; Ramadhan, 2022; Solomon, 2024; Tifada, 2021; Xinhua, 2023). Selain itu, Ukraina, Serbia, Republik Ceko, Yordania, dan Turki juga sama-sama

menganut sistem desentralisasi seperti Indonesia. (Krawchenko, 2023; Ciplić dalam (Drobnjaković & Panić, 2024; Khatib, 2020; Haydanka, 2020; Bayraktar & Massicard, 2012) yang dapat membantu penulis untuk mengetahui bagaimana pengelolaan warisan budaya di Indonesia dan negara-negara tersebut di era desentralisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan sejumlah referensi yang tidak terlepas dari literatur ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik atau masalah yang ingin diteliti (Putri, 2019). Namun, dokumen yang penulis gunakan untuk menganalisis topik yang diangkat pada penelitian ini hanya dengan menggunakan artikel jurnal. Artikel jurnal dipilih karena dinilai lebih dinamis dibandingkan jenis publikasi lainnya (Sejati et al., 2024). Selain itu, proses *peer review* dalam penerbitan artikel jurnal memastikan seleksi yang lebih mendalam, sehingga terbitannya memiliki kualitas yang tinggi, kuat, dan memberikan kredibilitas pada klaim ilmiah (Samsara, 2022; Seeber, 2020; UK Parliament, 2011).

Penulis menggunakan 10 artikel jurnal yang terbagi ke dalam 5 artikel jurnal Indonesia terindeks Sinta 1-4 dan 5 artikel jurnal internasional terindeks

Scopus. 10 artikel tersebut dipilih karena sesuai dengan topik yang penulis angkat dan setelah melakukan penyaringan teks melalui abstrak yang dibaca, kata '*decentralization*' (desentralisasi), '*cultural*' (budaya), dan '*cultural heritage*' (warisan budaya) menjadi gagasan utama yang dibahas dari 10 artikel jurnal tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Pemerintah daerah sudah seharusnya memandang budaya sebagai suatu aset daerah yang harus dikelola, dijaga, dan dipelihara dengan baik. Melalui pengembangan warisan budaya lokal, pemerintah daerah dapat meningkatkan prestisenya karena mampu untuk mendukung revitalisasi budaya di daerah mereka. Hal ini menjadikan budaya lokal sebagai aset daerah yang pada akhirnya dapat menjadi identitas atau kebanggaan bagi daerah tersebut (Pranoto, 2005). Di satu sisi, tantangan globalisasi yang tak henti-hentinya mendorong perubahan gaya hidup menjadi ancaman tersendiri dalam usaha menjaga dan melestarikan nilai-nilai warisan budaya bagi generasi muda (Suherman & Sirajuddin, 2018).

Desentralisasi Budaya di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015), desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mendefinisikan kebudayaan sebagai segala sesuatu yang berkaitan

dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Menggabungkan kedua definisi tersebut, desentralisasi budaya dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah pusat terkait urusan kebudayaan yang mencakup cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, berdasarkan asas otonomi, untuk diatur dan diurus secara mandiri dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang.

Desentralisasi budaya tidak diatur dalam satu undang-undang tunggal yang spesifik, melainkan merupakan bagian dari kerangka hukum yang lebih luas tentang pemerintahan daerah dan pemajuan kebudayaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah mengatur pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, dengan banyak kesamaan fundamental dalam tanggung jawab mereka. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan penting yang menunjukkan karakteristik

desentralisasi. Pemerintah daerah, secara spesifik, bertugas membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah diharapkan menjadi ujung tombak dalam menciptakan saluran dan cara nyata bagi masyarakat untuk terlibat, sesuai dengan konteks lokal masing-masing. Sementara itu, pemerintah pusat memiliki tugas unik, yaitu menggunakan kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional dan meningkatkan kerja sama internasional di bidang kebudayaan. Ini adalah ranah yang secara alami menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sebagai representasi negara di kancah global.

Peneliti telah menyajikan beberapa literatur yang membahas tentang desentralisasi budaya di Indonesia untuk melihat bagaimana kondisi warisan budaya dan kearifan lokal di Indonesia, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah, serta hambatan-hambatan yang harus dihadapi yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3. Penelitian-Penelitian Desentralisasi Budaya di Indonesia

1 Nama Penulis	Sugiharta (2012)
Informasi Jurnal	Judul Penelitian: “Desentralisasi dan Sumber Daya Aparatur: Problematika Pelaksanaan Desentralisasi Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau” Jurnal: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP). Vol. 3. No. 3. Hlm. 232-245. Terindeks Sinta 1.
Tujuan	Menelaah secara ringkas implementasi desentralisasi di sektor kebudayaan, terutama dalam hal pelestarian situs-situs bersejarah atau peninggalan purbakala di wilayah Sumatera Bagian Tengah (Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau).
Metode	Kualitatif
Hasil	Terdapat beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu (1) sedikitnya jumlah Arkeolog di wilayah Sumatera Bagian Tengah yang menyebabkan adanya ketimpangan yang sangat besar, di

	mana beban kerja mereka menjadi sangat berat, (2) keterbatasan dukungan pendanaan terhadap program pelestarian cagar budaya di daerah otonom (3) kekurangan atau tidak adanya tenaga ahli arkeologi di daerah otonom, (4) kurangnya dukungan dari kelembagaan, (5) buruknya manajemen kepegawaian, (6) iklim dan budaya kerja yang buruk.
Kesimpulan	Perlu melakukan reformasi secara menyeluruh terhadap aparatur, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah agar desentralisasi dalam pelestarian cagar budaya di Indonesia dapat berhasil.
2 Nama Penulis	Perdiana & Mubarak (2022)
Informasi Jurnal	Judul Penelitian: "Pengembangan Warisan Budaya Tambang Batubara Ombilin Kota Sawahlunto" Jurnal: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik. 4(3). Hlm. 209-216. Terindeks Sinta 4.
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan warisan budaya batubara Ombilin di Kota Sawahlunto
Metode	Kualitatif
Hasil	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan warisan budaya di Sawahlunto telah berjalan baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti pada tahap awal dan desain kelembagaan dalam <i>collaborative governance</i> . Pada tahap awal, masyarakat masih kurang memiliki pemahaman yang memadai untuk memanfaatkan dan menjaga warisan budaya Ombilin di Sawahlunto. Sedangkan pada desain kelembagaan, informasi yang dibagikan di luar forum hanya terkait dengan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Adapun faktor keberhasilan pengembangan warisan budaya Ombilin yaitu terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar stakeholder atau pemangku kepentingan. Adapun faktor penghambatnya meliputi budaya top down yang masih kuat dan tidak melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan.
Kesimpulan	Pengembangan warisan budaya Ombilin di Sawahlunto berjalan baik. Faktor keberhasilan pengembangan warisan budaya ini yaitu koordinasi dan komunikasi antar stakeholder, sedangkan faktor penghambatnya adalah pendekatan yang bersifat top down dan tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan.
3. Nama Penulis	Hapsa & Putra (2020)

Informasi Jurnal	<p>Judul Penelitian: “Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jambi dalam Upaya Peningkatan Pelestarian Benda Cagar Budaya Berbasis Kearifan Lokal di Muaro Jambi”</p> <p>Jurnal: Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 3. No. 2. Hlm. 341-350. Terindeks Sinta 3.</p>
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjaga cagar budaya di Provinsi Jambi.
Metode	Kualitatif
Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BPCB di Kota Jambil sudah baik yang dapat dilihat dari beberapa aspek seperti (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan dan pelatihan staf, (2) peningkatan kuantitas sarana dan prasara melalui anggaran yang terbatas, (3) melibatkan peran masyarakat dalam rencana strategi BPCB, (4) meningkatkan efektivitas pengelolaan cagar budaya dengan anggaran yang sedikit, serta (5) merealisasikan pelestarian cagar budaya yang menyeluruh melalui kerja sama antara semua pemangku kepentingan.
Kesimpulan	Pemerintah Kota Jambi melalui BPCB terus meningkatkan kinerja mereka dalam menjaga kelestarian cagar budaya di Jambi. Upaya ini mencakup pendataan, konservasi, branding, serta bimbingan teknis dan FGD.
4. Nama Penulis	Farida et al. (2020)
Informasi Jurnal	<p>Judul Penelitian: “Desentralisasi Wisata Religi Indonesia Melalui City Branding Wisata Kabupaten Bangkalan Madura”</p> <p>Jurnal: Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi. Vol. 6. No. 2. Hlm. 223-234. Terindeks Sinta 2.</p>
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis city branding di Kabupaten Bangkalan berbasis wisata religi melalui kearifan lokal.
Metode	Kualitatif
Hasil	Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Kabupaten Bangkalan sangat potensial untuk menumbuhkan pariwisata berbasis religi di Indonesia. Tiga tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat Bangkalan maupun di luar Bangkalan yaitu (1) Makam Syarifah Ambami, (2) Situs Putri Koneng, dan (3) Pasarehan Saichona Cholil untuk melakukan ziarah makam. Budaya ziarah makam di Kabupaten Bangkalan dapat menjadi sebuah <i>city branding</i> dengan sebutan “Kota Ziarah.”
Simpulan	Kabupaten Bangkalan memiliki kebiasaan, kesenian, dan kearifan lokal yang tak banyak dimiliki daerah lainnya di Indonesia. Namun, Kabupaten Bangkalan tidak memiliki <i>city</i>

	<i>branding</i> yang dapat menonjolkan daerahnya. Wisata religi dapat menjadi <i>city branding</i> Kabupaten Bangkalan sebagai ikon daerah tersebut dalam hal wisata berbasis religi.
5. Nama Penulis	Hijriyana et al. (2023)
Informasi Jurnal	Judul Penelitian: “Sinergitas Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Menjaga Kearifan Lokal” Jurnal: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 6. No. 4. Hlm. 792-799. Terindeks Sinta 4.
Tujuan	Untuk mengetahui singergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menjaga dan melestariakn kearifan lokal di Kampung Adat Urug, Bogor.
Metode	Kualitatif
Hasil	Kearifan lokal di Kampung Adat Urug masih terjaga dengan baik yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, budaya, norma, dan mitos. Meskipun kearifan lokal yang ada di Kampung Adat Urug masih terjaga dengan baik, ada dua tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga kearifan lokalnya yaitu tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal yang dihadapi yaitu pengaruh kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini. Sedangkan tantangan eksternalnya berupa perubahan budaya, seperti atap rumah masyarakat yang biasanya menggunakan <i>hateup</i> yang terbuat dari rumbia, jerami, ijuk, kini telah banyak menggunakan asbes. Untuk menjaga kearifan lokal Kampung Adat Urug, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, dinamisator, dan koordinator dengan baik. Sayangnya, sinergitas yang dibangun antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dan masyarakat Kampung Adat Urug dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal masih belum maksimal.
Kesimpulan	Terdapat sinergi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor sebagai penanggung jawab pelestarian dan pengembangan budaya dengan masyarakat Kampung Adat Urug. Meskipun sinergitas tersebut sudah ada, namun belum sepenuhnya berjalan optimal.

(Sumber: Diolah Penulis, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, desentralisasi budaya, terutama dalam hal pengelolaan dan pelestarian warisan budaya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Hal ini dapat dilihat dari

penelitian (Sugiharta, 2012) yang menyatakan bahwa pelestarian cagar budaya di wilayah Sumatera Bagian Tengah yang terdiri dari Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau

menghadapi berbagai macam masalah seperti kurangnya jumlah arkeolog, minimnya dukungan program pelestarian cagar budaya, serta buruknya manajemen kepegawaian dan budaya kerja di daerah otonom tempat cagar budaya tersebut.

Berbeda halnya dengan penelitian (Hapsa & Putra, 2020) yang mencoba melihat kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jambi dalam menjaga dan melestarikan benda-benda cagar budaya berbasis kearifan lokal di Muaro Jambi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja BPCB Jambi dianggap telah baik karena mereka terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya melalui perekrutan dan pelatihan kepada para staf atau karyawan berupa bimbingan teknis dan FGD (*Focus Group Discussion*), peningkatan sarana dan prasarana berupa pendataan dan konservasi benda cagar budaya, serta melibatkan peran masyarakat dalam menentukan strategi-strategi yang tepat terhadap pelestarian cagar budaya, yaitu melalui branding cagar budaya.

Penelitian (Perdiana & Mubarak, 2022) menyatakan bahwa pengembangan warisan budaya dunia Ombilin di Sawahlunto telah berjalan dengan baik. Faktor utama yang menjadi keberhasilan dalam pengembangan warisan budaya dunia ini terdapat pada jalinan komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder*, di mana terdapat dialog tatap muka yang dilakukan secara rutin, saling percaya antar *stakeholder*, komitmen yang kuat untuk sama-sama memajukan warisan budaya Ombilin, serta pemahaman bersama yang dapat dilihat dari tujuan, definisi masalah, dan nilai yang akan dicapai. Adapun faktor penghambat yang ditemui dalam

pengembangan warisan budaya ini terletak pada budaya *top down* oleh pemerintah dan masyarakat yang tidak diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat hanya berperan sebagai pelaksana yang turut serta mendukung Sawahlunto sebagai warisan budaya dunia.

Hal serupa juga ditemui di wilayah lain yaitu di Kampung Adat Urug, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Temuan penelitian (Hijriyana et al., 2023) menjelaskan bahwa kearifan lokal di Kampung Adat Urug masih terjaga dengan baik, meskipun terdapat tantangan internal dan eksternal yang dihadapi. Tantangan internal yang dihadapi masyarakat di Kampung Adat Urug yaitu berkaitan dengan kemajuan teknologi, di mana pengaruh teknologi berdampak besar terhadap generasi muda sebagai generasi penerus yang akan menjaga kearifan lokal di Kampung Adat Urug. Sedangkan tantangan eksternal yaitu berkaitan dengan perubahan struktur fisik rumah, yang sebelumnya menggunakan jerami dan rumbia, kini banyak rumah di Kampung Adat Urug yang beralih menggunakan atap asbes. Selain itu, terdapat sinergitas antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan masyarakat Adat Urug seperti terlibat aktif dalam setiap tradisi adat dan melakukan kontrol terhadap cagar budaya, serta memberikan dukungan dana untuk pelestarian warisan budaya. Akan tetapi, sinergitas ini belum sepenuhnya optimal karena proses interaksi dengan masyarakat Adat Urug yang tidak pernah dilakukan dan hanya menjalin komunikasi dengan kepala adat.

Untuk menjaga kearifan lokal, mengenalkan sebuah wilayah melalui *branding* merupakan salah satu solusi

yang dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Hasil penelitian (Farida et al., 2020) memandang bahwa *city branding* atau *branding* terhadap sebuah kota penting untuk mengembangkan sektor pariwisata daerah. Dalam hal ini, mereka menganggap bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata religi dengan beberapa tempat ziarah seperti Situs Putri Koneng, Makam Syarifah Ambami, dan Pasarehan Saichona Cholilyang biasanya sering dikunjungi oleh masyarakat Bangkalan atau masyarakat di luar Bangkalan. Mereka juga memandang

bahwa wisata religi dapat menjadi *city branding* yang efektif bagi daerah ini sebagai sebuah ikon wisata berbasis religi di Indonesia.

Desentralisasi Budaya di Beberapa Negara Luar

Selain menyajikan desentralisasi budaya di Indonesia, penulis juga menyajikan beberapa penelitian yang membahas desentralisasi budaya di luar negeri, terutama di negara Ukraina, Republik Ceko, Serbia, Yordania, dan Turki melalui tabel yang dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 4. Penelitian-Penelitian Desentralisasi Budaya di Beberapa Negara Luar

1	Nama Penulis	Pavlov et al. (2020)
	Informasi Jurnal	Judul Penelitian: "Branding of Cultural Tourism Objects of The United Territorial Communities of the Southern Megaregion of Ukraine" Jurnal: Journal of European Countryside. Vol. 12. No. 3 432-447. Terindeks Scopus
	Negara	Ukraina
	Tujuan	Untuk mengetahui branding obyek wisata di komunitas territorial terpadu (UTC) di wilayah mega region Ukraina sebagai alat pemasaran dan fungsi manajemen untuk membangun identitas lokal.
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa objek warisan budaya berwujud dan tak berwujud di UTC Ukraina berperan penting dalam membangun identitas lokal dan pariwisata berbasis budaya di komunitas ini. <i>Branding</i> UTC merupakan cara yang efektif untuk membentuk citra UTC di Ukraina sebagai tujuan yang menarik dan kompetitif di kalangan konsumen internal dan eksternal.
	Kesimpulan	Branding memiliki peranan yang vital dalam mempromosikan identitas dan daya tarik UTC di Ukraina sebagai tujuan pariwisata berbasis budaya.
2	Nama Penulis	Plaček et al. (2022)

Informasi Jurnal	<p>Judul Penelitian: “Devolution and the Efficiency of Cultural Heritage Preservation: The Case of Regional Museums in the Czech Republic”</p> <p>Jurnal: Journal of Tourism and Cultural Change. Vol. 20. No. 3. 1-18. Terindeks Scopus.</p>
Negara	Republik Ceko
Tujuan	Untuk menganalisis dampak devolusi terhadap efisiensi museum regional di Republik Ceko
Metode	Kuantitatif
Hasil	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa devolusi di Republik Ceko tidak menyebabkan efisiensi, bertentangan dengan teori umum desentralisasi. Hal ini terjadi karena jalur ketergantungan (struktur, kebijakan, dan praktik sebelumnya membatasi kemungkinan perubahan), <i>cherry picking</i> , bekunya reformasi administrasi publik dan pengelolaan warisan budaya di Republik Ceko yang masih menggunakan pendekatan konservatif.
Kesimpulan	Devolusi di Republik Ceko pada bidang perlindungan warisan budaya, tidak meningkatkan efisiensi. Selain itu, kebijakan desentralisasi yang seragam dapat memiliki efek kontra-produktif pada kondisi-kondisi tertentu.
3. Nama Penulis	Djukić et al. (2018)
Informasi Jurnal	<p>Judul Penelitian: “The Consequences of Urban Policies in Socialist Yugoslavia on the Transformation of Historic Centres: The Case Study of Cities in Northern Serbia”</p> <p>Jurnal: Journal of Housing and the Built Environment. Vol. 33. 555-573. Terindeks Scopus.</p>
Negara	Serbia
Tujuan	Untuk menganalisis dampak kebijakan perkotaan pada periode sosialis, pasca sosialis terhadap pusat kota bersejarah di beberapa kota Vojvodina, Serbia.
Metode	Kualitatif
Hasil	Berdasarkan hasil penelitian, pada periode awal sosialis, rencana kota mengusulkan renovasi besar-besaran di pusat kota bersejarah di Serbia mengikuti prinsip-prinsip modernisme. Pada tahun 1960-1970-an, muncul kesadaran untuk melestarikan warisan perkotaan bersejarah. Lalu, pada tahun 1980-1990-an perencanaan kota lebih menekankan pada regenerasi pusat kota bersejarah di Serbia dengan merevitalisasi ruang publik dan warisan bangunan. Periode transisi pasca sosialis (1990-an), terjadi stagnasi dan kerusakan di pusat kota akibat investasi yang tak terkendali dan perencanaan yang kurang kontrol. Pada tahun 2000-an,

	beberapa kota di Serbia mengadopsi konsep baru seperti pengembangan pedestrian dan konservasi, namun komersialisasi yang berlebihan menyebabkan merusak karakter warisan pusat kota.
Kesimpulan	Kebijakan desentralisasi berupa perencanaan perkotaan membantu menghidupkan kembali tradisi dan budaya lokal di kota-kota di Serbia.
4. Nama Penulis	Al Rabady et al. (2014)
Informasi Jurnal	Judul Penelitian: "Urban Heritage Governance within the Context of Emerging Decentralization Discourses in Jordan" Jurnal: Journal of Habitat International. Vol. 42. 253-263. Terindeks Scopus.
Negara	Yordania
Tujuan	Menganalisis budaya politik yang berkembang di Yordania dalam konteks pengelolaan warisan arkeologi dari masa kolonial hingga tahun 2000an.
Metode	Kualitatif
Hasil	Pada masa kolonial, pengelolaan warisan arkeologi di Yordania bersifat sentralistik, di bawah otoritas pemerintah pusat. Pada masa pasca kemerdekaan, Yordania masih menganut sentralistik, meskipun ada upaya untuk menerapkan desentralisasi pada awal 1980-an. Pada tahun 1990-an agenda pembangunan ekonomi dan proyek wisata di Yordania yang didanai oleh donor dari internasional menguatkan sentralistik di negara ini, dengan hanya melibatkan sedikit partisipasi dari pemerinah lokal. Pada tahun 2000-an, wacana desentralisasi kembali muncul di Yordania, namun terhalang oleh faktor politik, organisasi, dan perilaku yang menguat dari pemerintah pusat.
Kesimpulan	Pemerintah pusat masih menjadi aktor paling dominan dalam mengelola warisan arkeologi yang ada di Yordania, karena wacana desentralisasi di Yordania sering kali bertujuan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada, bukan berfokus dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan memperbaiki reformasi politik yang lebih dalam.
5. Nama Penulis	Bonini Baraldi & Shoup (2014)
Informasi Jurnal	Judul Penelitian: "Heritage Management at the Local Level: Rhetoric and Results in the case of Gaziantep, Turkey" Jurnal: International Journal of Cultural Policy. Vol. 20. No. 5. 588-612. Terindeks Scopus.
Negara	Turki

Tujuan	Untuk mengetahui pengelolaan warisan budaya di Gaziantep, Turki.
Metode	Kualitatif
Hasil	Berdasarkan hasil penelitian, kota Gaziantep di Turki merupakan contoh sukses dalam pelestarian dan peningkatan nilai warisan budaya melalui peran aktif dari pemerintah daerah. Keberhasilan ini terjadi karena faktor kepemimpinan di Gaziantep dan undang-undang desentralisasi yang diterapkan di Turki. Di satu sisi, Gaziantep menghadapi tantangan serius dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah kota untuk dapat menarik pengunjung internasional. Sayangnya, tidak dapat diaksesnya atraksi wisata dan kurangnya keunggulan kompetitif dibandingkan kota-kota lain di Turki menjadi masalah utama yang dihadapi mereka dalam menarik wisatawan internasional untuk datang ke Gaziantep. Oleh karena itu, Gaziantep melakukan upaya lain dengan mengoptimalkan GMM dan KUDEB dalam memperkaya warisan budaya di Gaziantep, di mana cara ini berhasil meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke Gaziantep.
Keimpulan	Gaziantep berhasil melestarikan warisan budaya yang ada di wilayahnya berkat peran aktif dan efektif dari pemerintah daerahnya. Budaya lokal telah meningkatkan kualitas hidup warganya dan kesadaran mereka akan warisan budaya.

(Sumber: Diolah Penulis, 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam desentralisasi budaya di beberapa negara di luar. Pertama, penelitian Pavlov et al., (2020) yang dilakukan di Ukraina, mereka menemukan bahwa objek warisan budaya berwujud dan tak berwujud di komunitas teritorial terpadu di Ukraina berperan penting dalam membangun identitas lokal masyarakat dan pariwisata berbasis budaya di wilayah tersebut. Mereka juga menemukan bahwa *branding* komunitas teritorial terpadu di Ukraina merupakan cara yang efektif untuk membentuk citra komunitas tersebut sebagai tujuan yang menarik untuk dikunjungi, baik itu bagi masyarakat sekitar atau masyarakat di luar wilayah tersebut.

Kedua, peran aktif dan efektif dari pemerintah daerah berkontribusi besar terhadap pelestarian warisan budaya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Bonini Baraldi & Shoup, (2014) yang menyatakan bahwa Kota Gaziantep di Turki merupakan contoh sukses dalam pelestarian dan peningkatan nilai warisan budaya yang ada di kota tersebut melalui peran aktif pemerintah daerah dan undang-undang desentralisasi yang diterapkan di Turki. Selain itu, Pemerintah Kota Gaziantep juga berhasil meningkatkan kualitas hidup warganya dan kesadaran mereka akan warisan budaya di Gaziantep. Di sisi lain, retorika yang terjadi dalam pengembangan warisan budaya di Gaziantep terfokus untuk menjadikan kota ini sebagai tujuan wisata internasional. Padahal, warisan budaya di Gaziantep masih belum cukup kuat untuk menarik wisatawan dalam skala besar.

Hasil penelitian Bonini Baraldi & Shoup, (2014) memiliki kemiripan dengan hasil penelitian Djukić et al., (2018) yang dapat dilihat dari

keberhasilan desentralisasi. Di Serbia, kebijakan desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah daerah membantu menghidupkan kembali tradisi dan warisan lokal di Serbia. Selain itu, kebijakan desentralisasi juga mampu mendorong investasi swasta dalam pembangunan baru dan penggunaan ruang kota yang lebih intensif pada tahun 1990-an. Akan tetapi, hal tersebut berdampak negatif terhadap kualitas hidup dan aktivitas ruang publik dan privat, mengganggu atmosfer dan identitas kota, serta merusak warisan budaya dan arsitektur di Serbia. Kota-kota kecil dan menengah di Serbia seharusnya melindungi warisan budaya mereka dari penurunan atau perubahan yang bersifat cepat agar tetap menarik bagi investasi baru. Akhirnya, Pemerintah Kota Serbia memutuskan untuk merevitalisasi pusat kota tua yang menjadi pusat komersial tradisional bersejarah.

Namun, penelitian dari Al Rabady et al., (2014) menunjukkan hal yang berbeda, pengelolaan warisan budaya di Yordania terbagi ke dalam dua fase, yaitu fase tata kelola arkeologi dan fase tata kelola warisan perkotaan. Pada fase pertama, sistem sentralistik masih sangat kuat dalam mewarnai budaya politik di Yordania. Sedangkan pada fase kedua, ada upaya yang telah dilakukan pemerintah Yordania untuk mengarah pada sistem desentralisasi dan demokrasi, terutama dalam tata kelola warisan budaya di Yordania. Sayangnya, budaya politik yang sentralistik masih mengakar kuat di negara ini, di mana desentralisasi di Yordania hanya wacana semata karena implementasinya sering kali dibatasi dan diatur oleh kepentingan elit yang lebih besar. Mereka menyebutnya sebagai kolonialisme internal, yaitu pemerintah pusat dan elit lokal menggunakan retorika liberalisme dan demokrasi sebagai alat untuk

mempertahankan dominasi mereka, tanpa memberikan kekuasaan yang substansial kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Sementara itu, hasil penelitian dari Plaček et al., (2022) menunjukkan bahwa devolusi di Republik Ceko tidak menyebabkan efisiensi, bertentangan dengan teori umum desentralisasi yang salah satu penekanannya pada efisiensi. Hal tersebut terjadi karena (1) jalur ketergantungan yaitu struktur, kebijakan, dan praktik sebelumnya membatasi kemungkinan adanya perubahan, (2) *cherry picking* yaitu mengambil hanya bagian-bagian tertentu dari kebijakan atau keputusan yang dihasilkan dari proses desentralisasi, (3) bekunya reformasi administrasi publik, dan yang terakhir (4) pengelolaan warisan budaya di Republik Ceko yang masih menggunakan pendekatan konservatif.

Analisis Perbandingan Desentralisasi Budaya di Indonesia dan Beberapa Negara Luar

Berdasarkan hasil yang telah disajikan, terdapat persamaan dalam desentralisasi budaya di Indonesia dan di luar negeri, terutama di negara Ukraina. *Branding* sebuah kota berbasis warisan budaya, baik itu kearifan lokal, cagar budaya, maupun seni pertunjukan dapat membantu terwujudnya kemajuan pada sektor pariwisata karena dapat menarik wisatawan domestik maupun asing untuk mengunjungi wilayah tersebut. Hal ini memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat karena terbukanya banyak lapangan pekerjaan. *Branding* kota berbasis warisan budaya juga dapat meningkatkan kepedulian masyarakat setempat untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan warisan budaya yang ada (Farida et al., 2020; Pavlov et al., 2020).

Selain itu, peran pemerintah daerah yang turut aktif dan efektif juga mendorong keberhasilan desentralisasi budaya. Di Indonesia, kinerja pemerintah daerah yang baik dan sinergitas yang dibangun antara pemerintah daerah dan masyarakat adat dapat membuat warisan budaya tetap terjaga dan terkelola dengan baik (Hapsa & Putra, 2020; Hijriyana et al., 2023; Perdiana & Mubarak, 2022). Hal serupa juga ditemui di Turki dan Serbia, di mana pemerintah daerah berperan besar dalam keberhasilan dua negara tersebut untuk mengelola warisan budaya di negara mereka. Khususnya di Turki, pengelolaan warisan budaya yang baik dapat membantu meningkatkan perekonomian wilayah setempat (Bonini Baraldi & Shoup, 2014). Sementara di Serbia, kebijakan desentralisasi melalui perencanaan perkotaan telah berperan dalam menghidupkan kembali budaya lokal di Serbia (Djukić et al., 2018).

Di sisi lain, terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi budaya, baik itu di Indonesia maupun di beberapa negara luar seperti Yordania dan Republik Ceko. Di Indonesia, beberapa tantangan yang dihadapi yaitu ketimpangan pengelolaan dan pendanaan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dalam hal ini masih sedikitnya tenaga ahli dalam bidang pelestarian budaya, eksploitasi sumber daya alam, hingga pengaruh kemajuan teknologi (Hijriyana et al., 2023; Sugiharta, 2012). Sedangkan di Yordania, budaya sentralistik masih kuat dan desentralisasi hanyalah retorika belaka (Al Rabady et al., 2014). Republik Ceko memiliki kemiripan dengan Yordania, di mana dominasi pemerintah pusat masih kuat yang ditandai dengan adanya *cherry picking* yaitu pemerintah pusat hanya memberikan otonomi dalam hal-hal tertentu yang tidak mengurangi

kekuasaan dan kontrol mereka secara signifikan (Plaček et al., 2022). Berbanding terbalik dengan Indonesia, di mana desentralisasi bukan hanya wacana semata.

Sebagaimana yang telah diuraikan, studi komparatif yang dilakukan oleh penulis dapat membantu untuk memberikan gambaran terkait pengelolaan warisan budaya di Indonesia dan di berbagai negara di era desentralisasi. Studi komparatif ini juga menjadi celah penelitian yang menarik karena belum ada penelitian yang secara spesifik yang membandingkan pengelolaan warisan budaya Indonesia di era desentralisasi dengan berbagai negara lainnya yang menganut sistem serupa. Selain itu, tulisan ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan warisan budaya yang lebih baik di Indonesia, mengingat pemerintah Indonesia mulai aktif memberikan dukungan dana di sektor kebudayaan, seperti melalui program DANA Indonesia, Semarak Budaya, serta Fasilitas Pemajuan Kebudayaan.

Kesimpulan

Desentralisasi di sektor kebudayaan di Indonesia menunjukkan persamaan dan perbedaan signifikan dibandingkan dengan negara lain, seperti Ukraina, Turki, Serbia, Yordania, dan Republik Ceko. Persamaan utama terletak pada potensi *branding* kota berbasis warisan budaya sebagai pendorong pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang terlihat dari kasus Indonesia dan Ukraina. Branding ini tidak hanya menarik wisatawan domestik dan asing, tetapi juga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya. Selain itu, peran aktif

dan efektif pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan desentralisasi budaya. Di Indonesia, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat telah terbukti menjaga dan mengelola warisan budaya dengan baik. Hasil serupa juga ditemukan di Turki, di mana pengelolaan warisan budaya yang baik mendukung peningkatan ekonomi lokal, serta di Serbia, tempat kebijakan desentralisasi melalui perencanaan perkotaan berhasil menghidupkan kembali budaya lokal.

Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam desentralisasi budaya di Indonesia seperti tenaga ahli dalam bidang pelestarian budaya yang masih sedikit, eksploitasi sumber daya alam, dan kemajuan teknologi. Sedangkan di Yordania, kolonialisme internal yang masih mengakar kuat merupakan penghambat terbesar dalam proses desentralisasi budaya di negara ini. Sementara di Republik Ceko pengelolaan warisan budaya masih bersifat konservatif, adanya *cherry picking*, dan bekunya reformasi administrasi publik.

Temuan dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasi secara luas. Meskipun demikian, studi ini tetap bernilai penting karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pengelolaan warisan budaya dilakukan di berbagai negara, khususnya di Indonesia, dengan mengidentifikasi persamaan, peluang, dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Untuk memperkaya pemahaman, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi desentralisasi budaya di daerah-daerah dengan karakteristik yang berbeda di Indonesia. Studi komparatif yang lebih mendalam dengan negara-negara lain juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya. Selain itu, pengumpulan

data yang berbeda seperti data primer berupa wawancara, dan observasi, serta penggunaan teknik *systematic literature review* dapat dilakukan untuk penelitian mendatang agar mendapatkan gambaran terkait desentralisasi budaya di negara-negara lainnya secara holistik dan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Al Rabady, R., Rababeh, S., & Abu-Khafajah, S. (2014). Urban heritage governance within the context of emerging decentralization discourses in Jordan. *Habitat International*, 42, 253–263. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.01.002>
- Battaglia, S. (2024). 18 Serbian Culture Facts. Facts.Net. <https://facts.net/culture-and-the-arts/18-serbian-culture-facts/>
- Bayraktar, S. U., & Massicard, E. (2012). Decentralisation in Turkey. In *Agence Fran caise de D' eveloppement: Vol. Focales* (Issue July).
- Bonini Baraldi, S., & Shoup, D. D. (2014). Heritage management at the local level: rhetoric and results in the case of Gaziantep, Turkey. *International Journal of Cultural Policy*, 20(5), 588–612. <https://doi.org/10.1080/10286632.2013.874419>
- Bonnell, J. E., & Koontz, T. M. (2021). A cross-cultural comparison of government influence on collaborative watershed institutions in Ohio (USA) and the Dominican Republic and implications for decentralization of resource management. *Society & Natural Resources*, 34(10), 1412–1422. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/08941920.2021.1951410>
- Buana, M. S. (2022). Struggling with Development: How Decentralization Undermines Traditional Farmers' Cultural Rights in Barito Kuala, Indonesia. *JSEAHR*, 6, 226. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i2.30184>
- Czech Walk. (2023). *Culture and Tradition in Czech republic*. <https://czechwalks.com/guide/culture-and-tradition/>
- Direktorat Perlindungan Kebudayaan. (2022). *Sebanyak 196 Objek Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/sebanyak-196-objek-ditetapkan-sebagai-cagar-budaya-peringkat-nasional/>
- Djukić, A., Stupar, A., & AntoniĆ, B. (2018). The consequences of urban policies in socialist Yugoslavia on the transformation of historic centres: the case study of cities in Northern Serbia. *Journal of Housing and the Built Environment*, 33(3), 555–573. <https://doi.org/10.1007/s10901-018-9612-7>
- Drobnjaković, M., & Panić, M. (2024). Introduction of the Approach for Reviving the Sub-Municipal Level as a Spatial Aspect of Decentralization in Serbia. *Land*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/land13060752>
- Farida, F., Zulaikha, Z., & Putro, H. E. (2020). Desentralisasi Wisata Religi Indonesia Melalui City Branding Wisata Kabupaten Bangkalan Madura. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 223. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i02.2149>
- Fauzana, R. (2019). *Makna Nagari sebagai Representasi Sistem*

- Desentralisasi Bagi Masyarakat Minangkabau (Kajian Etnografi tentang Komunikasi Antar Budaya dalam Sistem Pemerintahan pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam).* 32.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/b7rhy>
- Hapsa, & Putra, F. (2020). Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jambi Dalam Upaya Peningkatan Pelestarian Benda Cagar Budaya Berbasis Kearifan Lokal di Muaro Jambi. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 341–350.
- Haydanka, Y. (2020). Urgent decentralization problems in the Czech Republic at a regional level: Political, administrative and sociological dimensions. *Public Policy and Administration*, 19(2), 253–265.
<https://doi.org/10.13165/VPA-20-19-2-08>
- Hijriyana, S. P., Lestari, R. Y., & Juwandi, R. (2023). Sinergitas Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Menjaga Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(1), 1.
<https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v13i1.15699>
- Hu, X. (2023). New media and cultural heritage politics: the intertwining of official authorised heritage discourse, folk decentralisation, and internet positivity in Chinese women's scripts. *International Journal of Heritage Studies*, 29(6), 547–565.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13527258.2023.2201869>
- Kemendikbudristek. (2023). *Statistik Kebudayaan 2023*. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
https://budbas.data.kemdikbud.go.id/statistik/isi_55797b4c-197d-4108-a450-0e37cfffef80.pdf
- Khatib, W. Al. (2020). *Decentralization in Jordan*. Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Konsola, D. (1988). Decentralisation and cultural policy in Greece. *Papers in Regional Science*, 64(1), 129–136.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1435-5597.1988.tb01120.x>
- Krawchenko, T. (2023). Ukraine's Decentralisation Reforms and the Path to Reconstruction, Recovery and European Integration. *LSE Public Policy Review*, 3(1), 1–9.
<https://doi.org/10.31389/lseppr.87>
- Oktari, R. (2020). *Tahukah Kamu, 5 Warisan Budaya Dunia UNESCO yang Ada di Indonesia?* Indonesia Baik.
https://indonesiabaik.id/motion_grafis/tahukah-kamu-5-warisan-budaya-dunia-unesco-yang-ada-di-indonesia
- Pavlov, O., Pavlova, T., & Pavlova, I. (2020). Branding of Cultural Tourism Objects of the United Territorial Communities of the Southern Megaregion of Ukraine. *European Countryside*, 12(3), 432–447.
<https://doi.org/10.2478/euco-2020-0023>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, (2017).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37642/uu-no-5-tahun-2017>
- Perdiana, V., & Mubarak, A. (2022). Pengembangan Warisan Budaya Tambang Batubara Ombilin Kota Sawahlunto. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4, 209–216.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.299>

- Plaček, M., Ochrana, F., Půček, M., Nemec, J., & Křápek, M. (2022). Devolution and the efficiency of cultural heritage preservation: the case of regional museums in the Czech Republic. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 20(3), 369–385. <https://doi.org/10.1080/14766825.2021.1886302>
- Pranoto, S. W. (2005). BUDAYA DAERAH DALAM ERA DESENTRALISASI. *Jurnal Humaniora*, 17(3), 236–242.
- Putri, A. E. (2019). EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING : SEBUAH STUDI PUSTAKA. 4(2), 39–42.
- Quintero, M. (2023). *Jordan's soaring tourism sector*. HVS.Com. <https://www.hvs.com/article/9699-jordans-soaring-tourism-sector>
- Ramadhan, M. (2022). 7 Warisan Budaya Dunia UNESCO di Ukraina, Ada yang Dibangun di Abad ke-5 Sebelum Masehi. Kompas. <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/02/27/141300981/7-warisan-budaya-dunia-unesco-di-ukraina-ada-yang-dibangun-di-abad-ke-5?page=all>
- Renko, V., Johannisson, J., Kangas, A., & Blomgren, R. (2022). Pursuing decentralisation: regional cultural policies in Finland and Sweden. *International Journal of Cultural Policy*, 28(3), 342–358. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10286632.2021.1941915>
- Rosyadi, K., Rozikin, M., & Trisnawati. (2014). ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH (Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(5), 830–836.
- Samsara, L. (2022). Tren publikasi. *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 18(2), 308–325.
- Santagati, M. E., Baraldi, S. B., & Zan, L. (2020). Understanding decentralization: deconcentration and devolution processes in the French and Italian cultural sectors. *International Journal of Public Sector Management*, 33(4), 435–460. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJPSM-02-2019-0050>
- Seeber, M. (2020). How do journals of different rank instruct peer reviewers? Reviewer guidelines in the field of management. *Scientometrics*, 122(3), 1387–1405. <https://doi.org/10.1007/s11192-019-03343-1>
- Sejati, A. A., Sudarmo, & Haryanti, R. H. (2024). Indigenous community governance in marine conservation: A bibliometric analysis. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1317(1), 12004.
- Sellato, B. (2015). Sultans' palaces and museums in Indonesian Borneo: National policies, political decentralization, cultural depatrimonization, identity relocalization, 1950-2010. *Archipel. Études Interdisciplinaires Sur Le Monde Insulindien*, 89, 125–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/archipel.494>
- Solomon, T. (2024). *UNESCO Reports 341 Cultural Sites in Ukraine Damaged, Puts Recovery Costs at \$9 B.* ARTNews. <https://www.artnews.com/art-news/news/unesco-reports-341-cultural-sites-in-ukraine-damaged-puts-recovery-costs-at-9-b-1234696435/>
- Sugiharta, S. (2012). Desentralisasi dan Sumber Daya Aparatur :

- Problematika Pelaksanaan Desentralisasi Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(3, Maret), 232–245.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10917>
- Suherman, A., & Sirajuddin, A. (2018). Kearifan Lokal Sebagai Basis Komunikasi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Dan Komunal. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 34–42.
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.152>
- Tifada, D. A. (2021). *Makin Banyak, Turki Kini Miliki 85 Aset Budaya sebagai Warisan Dunia UNESCO*. Voice of Indonesia.
<https://voi.id/berita/51599/makin-banyak-turki-kini-miliki-85-aset-budaya-sebagai-warisan-dunia-unesco>
- UK Parliament. (2011). *Peer review in scientific publications*.
<https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmsctech/856/856.pdf>
- UNESCO. (2024). *Serbia*. UNESCO World Heritage Convention.
<https://whc.unesco.org/en/statesparties/rs>
- Xinhua. (2023). *Total 10.500 artefak ditemukan di Turki sepanjang 2022*. ANTARA.
<https://www.antaraneews.com/berita/3362517/total-10500-artefak-ditemukan-di-turki-sepanjang-2022>